

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar merupakan satuan pendidikan yang amat penting keberadaannya. Sebab setiap orang tentu mengakui tanpa menyelesaikan pendidikan dasar secara formal seseorang tidak mungkin dapat mengikuti atau melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan berikutnya, atau pendidikan yang lebih tinggi. Memperhatikan penting dan peranannya yang demikian besar itu, Sekolah Dasar harus dipersiapkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi Sekolah Dasar yang bermutu, yang menjadi harapan dari bangsa ini.

Sekolah Dasar yang bermutu tentu lulusannya bermutu adalah awai atau dasar pertama untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal yang tidak dapat disangkal, tentunya kualitas SDM suatu bangsa pada hakekatnya merupakan cermin kualitas pendidikan, sebab pendidikan adalah dunia dimana kualitas SDM dibentuk dan dilahirkan yang tentunya diawali dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Asy'ari (Kompas, 28 Mei 2009) pada Sياهوן ,Amiruddin (2006:11), mengatakan, secara jujur harus diakui, pendidikan kita mempunyai andil cukup besar terhadap munculnya krisis multi dimensi yang kita hadapi sebagai akibat rendahnya kualitas SDM yang kita miliki. Dengan demikian adanya perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta kekerasan dalam konflik sosial, ekonomi, politik dan agama serta perlawanan terhadap hukum adalah manifestasi kualitas SDM yang rendah dan mau tidak mau harus diakui

sebagai produk pendidikan kita yang telah gagal membentuk dan melahirkan SDM yang berkualitas.

Menurut Sagala (2006:170) ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan : (a) kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional berorientasi pada keluaran pendidikan (*output*), terlalu memusatkan pada masukan (*input*) dan kurang memperhatikan proses pendidikan, (b) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi, segala sesuatu diatur secara sentral menyebabkan sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu pendidikan menjadi kurang termotivasi. (c) Peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana, padahal peran serta mereka sangat penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas.

Menurut laporan Bank Dunia yang berjudul, *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery* (1998) pada Monang Sitorus (2006:148), merekomendasikan lima aspek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu: (a) pemberdayaan local, (b) penetapan kembali tanggungjawab, (c) pembangunan kemampuan kelembagaan, (d) pemberian otonomi yang lebih besar dengan menejemen yang bertanggungjawab, dan (d) sistem pendanaan yang menjamin pemerataan dan efisiensi.

Dengan digulirkannya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan

bertanggungjawab kepada daerah dan masyarakat lokal untuk mengembangkan pendidikan di daerah masing-masing. Karena itu penyelenggaraan pendidikan di daerah memerlukan dukungan masyarakat. Dasar hukum dilibatkannya masyarakat lokal dalam pendidikan diatas diatur dalam undang-undang N0.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bagian ketiga pasal 56 ayat (1) mempertegas masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Menurut Edward E. Lawler pada sagala (2006:129) penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Amerika Serikat ternyata dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Hal ini disebabkan adanya mekanisme yang lebih efektif dan lebih cepat dalam pengambilan keputusan, memberi dorongan semangat kinerja baru sebagai motivasi berprestasi bagi kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai menejer sekolah. Demikian diharapkan bahwa penerapan MBS di Indonesia dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar seperti di Amerika Serikat. Dalam rangka itulah MBS tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan, MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan agar dapat mengakomodasikan keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Untuk menjalin hubungan yang erat antara sekolah dan masyarakat, maka salah satu komponen sekolah dalam rangka MBS adalah manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat.

Dengan terbukanya ruang pemberdayaan satuan pendidikan ini maka strategi peningkatan kinerja sekolah diharapkan berhasil dengan implementasi MBS nya. Sekolah diberdayakan untuk mengenal perubahan dengan melakukan inovasi dan memiliki kekuasaan untuk mengoptimalkan sumberdaya sekolah dengan memberdayakan masyarakat melalui komite sekolah, sehingga mampu meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap siswa.

Kepala Sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi MBS dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan kemampuan untuk menggerakkan warga sekolah bekerjasama dengan warga masyarakat melalui komite sekolah yang merupakan wadah pemberdayaan masyarakat maupun langsung terhadap orang tua siswa, untuk turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dengan demikian partisipasi, warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sejalan dengan latar belakang dari dilakukannya reorientasi penyelenggaraan pendidikan dari manajemen berbasis pusat menuju manajemen berbasis sekolah, sebab manajemen berbasis sekolah adalah suatu model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat (hubungan sekolah dengan masyarakat)

Untuk mencapai hal di atas sangat dibutuhkan kerjasama dan peran kepala sekolah dengan peran komite sekolah

Partisipasi aktif warga masyarakat untuk memberhasilkan implementasi MBS sangat dibutuhkan dalam hal pembiayaan, dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan sekolah. Sekolah harus lebih banyak mengajak

warga masyarakat secara langsung maupun melalui komite sekolah dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat luas dan itulah sebabnya salah satu komponen sekolah sekolah dalam rangka implementas MBS adalah hubungan sekolah dengan masyarakat yang mengharapkan adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat yang dalam menjalin hubungan yang harmonis tersebut dapat dilakukan melalui hubungan antara kepala sekolah dari aspek sekolah dan komite sekolah dari aspek masyarakat, artinya hubungan yang harmonis antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk meningkatkan prestasi sekolah adalah gambaran hubungan sekolah dengan masyarakat terjalin dengan harmonis.

Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari bawah. Konsumen yang harus dilayani kepala sekolah adalah murid dan orang tuanya, masyarakat dan para guru. Kepala sekolah jangan selalu menengok ke atas sehingga hanya menyenangkan pimpinanya namun mengorbankan masyarakat, pendidikan yang utama. Dengan demikian kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu harus melihat kepentingan lembaga sekolah dan masyarakat, maka dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah harus bersama-sama dengan seluruh stakeholders pendidikan.

Agustinus Bandur (2009:7) bahwa di sekolah-sekolah yang ada di NTT Komite sekolah sering tidak sejalan dalam pengambilan keputusan dengan kepala sekolah. Namun tidak dijelaskan apa penyebab ketidak sejalan tersebut, tetapi yang pasti bila kepala sekolah tidak sejalan dengan komite sekolah dalam pengambilan keputusan tentu proses penyelenggaraan pendidikan tidak akan dapat

dilakukan dengan maksimal artinya keadaan ini menggambarkan ketidak harmonisan hubungan antara warga sekolah dengan warga masyarakat.

Monang Sitorus (2006:155) pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum optimal di Kabupaten Tobasamosir, tahapan yang ditetapkan dalam isi kebijakan Mendiknas itu belum dilakukan secara sistematis dan orang-orang yang duduk dalam kepengurusan dalam komite sekolah tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, ada pengurus yang duduk di komite sekolah yang seharusnya duduk di dewan pendidikan. Dengan penyimpangan ini bagaimanapun aktivitas yang dilakukan dalam melakukan peran sebagai komite sekolah tidak akan menunjukkan seperti yang diharapkan sebagai wadah untuk menampung dan memberdayakan warga masyarakat untuk kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Hasbullah dalam bukunya Otonomi Pendidikan (2006:82) menyayangkan Komite sekolah yang semestinya ujung tombak yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan masih menuai kritik yang tidak jarang dipermasalahkan. Persoalannya, keberadaanya tidak memberikan kemudahan, solusi dan menjembatani antara sekolah dengan pemerintah daerah untuk perbaikan pendidikan, tetapi malah menjadi beban bagi sekolah, Komite sekolah minta fasilitas dan kantor kepada sekolah. Sementara sangat diharapkan peran serta masyarakat/komite sekolah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah baik dalam bantuan dana, serta masukan-masukan yang berhubungan dengan perbaikan kualitas sekolah, sebab dengan peran tersebut diharapkan dapat memperbaiki mutu penyelenggaraan pendidikan bukan menjadi beban kepada lembaga sekolah. Keadaan tersebut di atas jelas tidak akan

menunjukkan hubungan yang baik/harmonis antara sekolah dengan masyarakat seperti yang menjadi tuntutan dari manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai Implementasi MBS untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Sebab yang diharapkan komite sekolah sebagai wadah dari masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan baik dari segi pendanaan maupun dari segi masukan-masukan lain yang diharapkan dalam peningkatan kualitas pendidikan, ternyata menjadi beban sekolah.

Dari keadaan-keadaan di atas maka penelitian ini difokuskan pada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat melalui peran kepala sekolah dan peran komite sekolah dalam implementasi MBS. Hal ini sejalan dengan Komite sekolah adalah mitra terdekat sekolah untuk bekerjasama dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

SDN 060930 Kecamatan Medan Amplas adalah salah satu SDN dari empat SDN yang berada di satu lokasi yang terletak di jalan turi kecamatan Medan Amplas kelurahan timbang deli yang letaknya kurang lebih 9 Km dari inti kota Kotamadya Medan arah Tanjung Morawa. SDN 060939 Kecamatan Medan Amplas adalah SD yang tertua dari tiga SD yang lain di lokasi itu, ke empat SDN ini satu sama lain tidak terlihat adanya perbedaan yang spesifik, ke empat SDN ini memiliki komite sekolah yang berbeda, namun menurut pengakuan kepala sekolah dan komite sekolah yang kebetulan ketemu dengan peneliti pada saat itu tanggal 02 Agustus 2010 pukul 9.30 di kantor kepala sekolah, bahwa komite sekolah yang paling aktif dari empat SDN yang ada di lokasi itu adalah komite

sekolah SDN 060939 Kecamatan Medan Amplas, serta kerjasama kepala sekolah dengan komite sangat baik, sedangkan komite sekolah dari tiga SDN yang lainnya datang ke sekolahpun sangat jarang, tetapi komite sekolah SDN 060939 minimal tiga kali dalam seminggu pasti hadir di sekolah dan hasil kerja komite sekolah telah menambah fasilitas sekolah yaitu sebuah joglo dan bangunan kantor salah satu SDN yang ada dilokasi sekolah tersebut, dan menurut informasi dari beberapa orang guru aktivitas Komite sekolah SDN 060939 ini adalah diakui bahkan Ka Cabdis pun mengakuinya. Kepala sekolah mengakui dengan terus terang bila kepala sekolah tidak berada di sekolah pengawasan lebih di percayakan kepada komite sekolah dari pada kepada wakilnya sendiri. Karena itulah penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah dan komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di SDN 060939 Kecamatan Medan Amplas.

B. Fokus Penelitian

Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditentukan oleh bagaimana pendidikan itu dilakukan, artinya tanpa melalui pendidikan yang dikelola dengan baik mustahil Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dapat dilahirkan. Atas pertimbangan itulah selayaknya semua pihak sudah harus memberikan perhatian secara maksimal terhadap penyelenggaraan pendidikan, yang dalam penelitian ini fokus pada pelaksanaan Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu komponen sekola itu sendiri melalui peran kepala sekolah dan peran komite sekolah dalam mengimplemetasikan MBS.

Banyak cara yang dilakukan oleh sekolah untuk menerapkan MBS, tetapi penelitian ini fokus pada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai komponen sekolah melalui peran kepala sekolah dan peran komite sekolah dalam mengimplementasikan MBS di SDN 060939 Kecamatan Medan Amplas.

C. Masalah Penelitian

Dalam rangka implementasi MBS sebagai salah satu komponen manajemen sekolah adalah pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, dan MBS adalah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah dengan masyarakat, maka dengan menerapkan sistem MBS dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah jelas sudah melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian hanya keterlibatan antara kepala sekolah, guru dan siswa sebagai *stakeholders* internal, kemudian komite sekolah masyarakat/orang tua siswa, pengusaha, cendikiawan/pemuka agama sebagai *stakeholders* eksternal pendidikan dalam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dengan peran masing-masing *stakeholders* tersebut, harapan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dapat terwujud sehingga akan melahirkan SDM yang bermutu. Dengan demikian, maka ingin dilihat dan diketahui sampai sejauh manakah manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat melalui peran kepala sekolah dan peran komite sekolah untuk melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal dalam mengimplementasikan MBS sehingga menghasilkan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Maka masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimanakah peran kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu komponen manajemen sekolah dalam implementasi MBS di SDN 060939 Kecamatan Medan Amplas
2. Bagaimanakah peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu komponen manajemen sekolah dalam implementasi MBS di SDN 060939 Kecamatan Medan Amplas.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan masalah diatas maka penelitian bertujuan :

1. Mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu komponen manajemen sekolah dalam implementasi MBS di SDN 060939 Kecamatan Medan Amplas
2. Mendeskripsikan peran serta Komite Sekolah dalam pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu komponen manajemen sekolah dalam implementasi MBS di SDN 060939 Kecamatan Medan Amplas

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis:

1. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pendidikan pada umumnya dan Ilmu Administrasi Pendidikan pada khususnya

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis, yang meliputi:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk membenahi kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), khususnya pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu komponen sekolah dalam rangka implementasi MBS
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pihak pengelola pendidikan untuk mengoptimalkan sosialisasi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan sekolah khususnya pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu komponen sekolah dalam rangka implementasi MBS
- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi *Stakeholders* (Dinas Pendidikan, Pihak Sekolah, dan Masyarakat) untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
- 4) Dapat digunakan menjadi pedoman bagi kepala sekolah dan salah satu solusi alternatif terhadap permasalahan kualitas pendidikan.

F. Batasan Istilah

Sesuai dengan judul penelitian ini batasan istilah yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah penerapan atau juga dapat diartikan dengan pelaksanaan
2. Manajemen Berbasis Sekolah adalah otonomi sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan otonomi sekolah dengan melibatkan *stakeholder* unit sekolah.
3. Otonomi Sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah bersama dengan warga masyarakat sesuai dengan peraturan per undang-undangan pendidikan nasional.
4. Mutu Pendidikan adalah tingkat ketercapaian dari penyelenggaraan pendidikan yang dinilai dari mutu lulusan atau prestasi peserta didik /siswa yang dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan (proses belajar mengajar) di sekolah
5. Hubungan Sekolah dan masyarakat adalah kerjasama yang dilakukan oleh warga sekolah dengan warga masyarakat untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
6. Implementasi MBS adalah pengelolaan pendidikan dengan menerapkan otonomi sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan melibatkan *stakeholder* unit sekolah dan masyarakat
7. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan atau usaha untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pendidikan di sekolah.